

SKRIPSI
EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BISSU DI PANGKEP DALAM
KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK

SANDRAWATI HUKOM

E041171002



DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL
EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BISSU DI PANGKEP DALAM
KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik

Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

SANDRAWATI HUKOM

E041171002

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BISSU DI PANGKEP DALAM
KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**SANDRAWATI HUKOM
E041171002**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 25 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP M.Si
NIP 197308131998022001

Pembimbing Pendamping,


Andi Naharuddin, S.IP, M.Si.
NIP 197311222002121001

Mengetahui,
Ketua Departemen
Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D
NIP 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BISSU DI PANGKEP DALAM
KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK

Disusun dan Diajukan Oleh:

SANDRAWATI HUKOM

E041171002

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, Senin 25 April 2022.

Menyetujui.

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Gustiana A.Kambo, S.IP, M.Si (.....)

Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Muh. Imran, S.IP, M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sandrawati Hukom

NIM : E041171002

Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul:

“EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT BISSU DI PANGKEP DALAM KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini ibenar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 April 2022

Yang menyatakan,



Sandrawati Hukom

ABSTRAK

Sandrawati Hukom, E041171002. Eksistensi Adat Bissu Dalam Kajian Sosiologi Politik. Di bawah bimbingan Gustiana A.Kambo dan Andi Naharuddin

Komunitas adat Bissu merupakan budaya yang memerlukan pelestarian dan perhatian dari pemerintah. Perumusan kebijakan dilakukan dengan melalui proses yang melibatkan berbagai faktor budaya. Proses perumusan kebijakan pelestarian kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan yang melibatkan peran aktor-aktor- menjadi hal penting dalam upaya membantu suatu kebijakan pemerintahan partisipasi agar masyarakat adat mendapat perhatian dari pemerintah terhadap kelangsungan hidup mereka seperti pelestarian kebudayaan yang harus tetap dijaga dalam memberdayakan kebudayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menjelaskan hubungan dan interaksi sesama Bissu sehingga dapat bertahan dalam komunitas kecil hingga saat ini dan mengetahui apa saja yang menjadi respon pemerintah daerah terhadap keberadaan komunitas adat Bissu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, informan, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Negara dan kekuasaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas ini sudah mulai berkurang, berbagai kebijakan dan upaya pemerintah khususnya kabupaten Pangkep dalam menyikapi keberadaan kaum Bissu sebagai salah satu warisan budaya yang harus di lestarikan agar komunitas ini dapat eksis, berbeda dengan kaum Bissu yang ada di kabupaten lainnya yang kurang mendapat perhatian oleh pemerintahnya. Komunitas adat Bissu ini adalah komunitas masyarakat yang memiliki keistimewaan disebuah negara, dengan melihat dalam prespektif sosiologi politik. Bagaimana negara menerima komunitas Bissu dengan keunikannya yang tidak memiliki identitas gender, meskipun sering mendapat penolakan. Secara kewarganegaraan negara hanya mengenal dua gander yaitu laki-laki dan perempuan. Negara menerima adanya komunitas adat Bissu ini sebagai warisan budaya, artinya Negara telah memberikan ruang untuk komunitas Bissu. Eksistensi komunitas Bissu di kabupaten Pangkep direspon baik oleh pemerintah setempat, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan Bissu dalam kegiatan-kegiatan pemerintah dan pemberian lahan seperti rumah arajang, dan kaum Bissu di izinkan untuk melakukan ritual mapalili serta adanya kebijakan-kebijakan lainnya dari pemerintah untuk Komunitas adat Bissu.

Kata kunci : Eksistensi Adat Bissu, Sosiologi Politik, Negara, Kekuasaan.

ABSTACT

Sandrawati Hukom. E041171002. The Existence of Bissu Customs in the Study of Political Sociology. Under the guidance of Gustiana A.Kambo and Andi Naharuddin

Bissu indigenous community is one of the cultures that requires preservation and attention from the government. Policy formulation is carried out through a process involving various cultural factors. The process of formulating cultural preservation policies in South Sulawesi involving the role of actors is important in an effort to help a participation government policy so that indigenous peoples get attention from the government for their survival such as cultural preservation that must be maintained in empowering culture.

This research aims to find out, describe, and explain the relationship and interaction of bissu so that it can survive in small communities to date and know what is the response of the local government to the existence of the Bissu indigenous community. This research uses qualitative methods with a case study approach. Data retrieval was conducted by interviews, informants, observations, and documentation related to the themes raised in this study. The concepts used in this study are state and power.

The results of this study show that this community has begun to decrease, various policies and efforts of the government, especially Pangkep regency in addressing the existence of the Bissu as one of the cultural heritage that must be preserved so that this community can exist, in contrast to the Bissu in other districts that are not received attention by the government. Bissu indigenous community is a community of people who have privileges in a country, by looking in perspective political sociology. How the state accepts bissu communities with their uniqueness that has no gender identity, despite frequent rejections. Nationally the country knows only two genders, namely male and female. The state accepts the existence of this bissu indigenous community as a cultural heritage, meaning that the state has made room for the Bissu community. The existence of bissu community in Pangkep regency was responded well by the local government, this can be seen from Bissu's involvement in government activities and land giving such as arajang houses, and bissu are allowed to perform mapalili rituals and other policies from the government for bissu indigenous communities.

Keywords: Existence of Bissu Customs, Political Sociology, State, Power.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Adat Bissu di Pangkep Dalam Kajian Sosiologi Politik” inidapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelarSarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan oleh penulis untuk dapat menyempurnakan tulisan ini dan kiranya dapat bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya. Selain itu, penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis ucapkan terima kasih kepada Ibunda **Tri Shanti Y.S** dan kepada (Almh.) Ayahanda **Robby Hukom** atas segala cinta kasih sayang yang tulus, yang senantiasa memberikan doa dan menjadi penyemangat serta pengorbanan yang tak dapat tergantikan dalam kehidupan penulis, dan saudara **Rikky Yansen** selaku patner terbaik yang selalu mendukung dan membantu penulis baik dalam suka maupun duka. **Melinda Mariani Hukom, Melisa Khayatun Hukom, Sinta, Leony Agnes, Ariel Rafael dan Alexis Anastasya** selaku Saudara dari penulis dan Bapak **Stefanus**

Tato Kanao dan **Yuliana Barrang** selaku wali dari penulis dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan moral maupun material, sehingga terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga skripsi ini dapat selesai. melalui skripsi ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si** selaku pembimbing utama dan bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si** selaku pembimbing pendamping yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Seluruh Dosen Pengajar dan staff Departemen Ilmu Politik, (Alm.) **Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA; Prof. Dr. Armin, M.Si; Prof Muhammad, S.IP, M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; A. Naharuddin S.IP, M.Si; Dr. Phil Sukri, M.Si; A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si; Dr. Ariana Yunus, S.IP,**

M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah, S.IP, M.Si; Hariyanto, S.IP, MA; (Alm.) Prof Basir Syam, M.Ag; Imran, S.IP, M.Si; Sakinah Nadir, S.IP, M.Si; Dian Ekawaty, S.IP, MA dan Zulhajar, S.IP, M.Si

6. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik.
7. Kepada seluruh informan penulis yang berada di Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri Desa Bontomatene.
8. Kepada Sahabat penulis **Putri Anandika, Nursakinah Idris, Nadila Asri, Fajar Widayanti, Maharani Anugerah, Azizan, Kefrin, Hartoni, Muhlis, Christine, Mukkaramma, Etika Rahma Salina, Lisa, Lusiana, Agnes Cecilia**, serta teman yang tidak sempat saya sebutkan satupersatu, yang telah memberikan canda tawa dan semangat serta selalu mendengarkan keluh kesah selama proses pengerjaan skripsi.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Dekrit dan Ilmu Politik 2017 terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, waktu dan kenangan selama kuliah.
10. Keluarga besar Himapol Fisip Unhas yang tidak dapat penulis disebutka satu persatu, terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
11. Kepada teman-teman PPGT dan pengurus PPGT Jemaat Bara-Baraya dan Ibu **Pdt. Yustin Eli Lambe S.Th** terima kasih atas perhatian dan dukungan doa yang diberikan kepada penulis.

12. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang sudah berjuang, bertahan, memaafkan, menerima dan tidak menyerah sampai sejauh ini.

Sekali lagi terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan, bimbingan, dukungan dan perhatian serta kerjasamanya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 12 April 2022

Penulis

Sandrawati Hukom

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Konsep Sosiologi Politik	13
2.1.2 Makna Tentang eksistensi	20
2.1.3 Masyarakat Adat	23
2.2. Telaah Pustaka	32
2.3. Kerangka Pikir	35
2.4. Skema Pikir	36

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Tipe dan Jenis Penelitian	37
3.2. Lokasi Penelitian	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	40
3.3.1. Data Primer	40
3.3.2. Data Sekunder	41
3.4. Informan Penelitian	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5.1. Wawancara	42
3.5.2. Studi Pustaka dan Dokumentasi	42
3.5.3. Observasi	43
3.6. Teknik Analisis Data	44
3.6.1. Reduksi Data	44
3.6.2. Penyajian data (display data)	44
3.6.3. Penarikan Kesimpulan	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Desa Bontomatene	46
4.2 Kondisi Sosial Budaya	47
4.3 Kondisi Kependudukan	48
4.4 Kondisi Pemerintahan Desa	50
4.5 Visi dan Misi	52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Komunitas Adat Bissu	53
5.2 Hubungan Interaksi Antar Bissu	58
5.3 Respon Pemerintah Terhadap Keberadaan Bissu	67
5.3.1. Upaya Pelestarian Komunitas Adat Bissu	73
5.4 Eksistensi Bissu di Pangkep	80
5.4.1. Upaya Bissu Mempertahankan Eksistensinya	85
BAB VI PENUTUP	90
6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki beragam kebudayaan yang begitu menarik perhatian para wisatawan hingga ke mancanegara. Salah satunya yaitu etnis Bugis yang memiliki banyak keunikan dan khas yang tidak dimiliki etnis yang lainnya. Adapun keistimewaan tradisi etnis Bugis yang sudah ada sejak masa kepercayaan tradisional pra-islam yang masih dianut sampai sekarang oleh sebagian masyarakat Bugis yaitu keberadaan kaum Bissu.

Bissu yang menggambarkan adanya pembagian gender di dalam lingkungan masyarakat etnis di Indonesia khususnya di Sulawesi selatan, yang diakui adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan pembagian gender di lingkungan suku Bugis. Menurut Davies dalam (Suliyati, 2018: 54) menjelaskan bahwa gender dalam masyarakat suku Bugis yang diakui ada lima kategori, yakni; oroane, makkundrai, calalai, calabai, bissu. Bissu dipahami golongan yang tidak memiliki gender, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan lesbian maupun banci. Penampilan bissu dianggap istimewa, karena ia berpakaian tidak seperti laki-laki dan tidak pula seperti perempuan. Komunitas bissu memakai pakaian khusus, yang hanya dipakai oleh bissu itu sendiri.¹

¹Andi Misdayanti. Fungsi Dan Peran Sosial Komunitas Bissu Di Kabupaten Bone .Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. HAL 2

Bissu adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan dengan dunia mistik. Peran Bissu dalam masyarakat Bugis sangat penting dan mereka memiliki status yang tinggi. Masyarakat Bugis mempercayai bahwa Bissu memiliki kekuatan supranatural dan dianggap sebagai manusia sakti. Tugas dan peran Bissu dalam setiap upacara adat Bugis adalah sebagai pendeta atau pemangku adat.²

Kaum Bissu merupakan peninggalan sejarah dalam kitab I La Galigo dari masa Bugis Kuno yang begitu mencuri perhatian para wisatawan untuk mengenal dan mengetahui perjalanan sejarah para kaum Bissu baik dari segi adat, budaya dan ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum Bissu. Bissu adalah waria yang berbeda dengan kebanyakan yang dijumpai dalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Kaum Bissu dahulu mendapat perlakuan khusus dalam eksistensinya, sebagaimana peranan mereka yang turut menentukan hajat hidup masyarakat Bugis.

Menariknya Untuk menjadi seorang Bissu bukanlah pilihan yang mudah, menurut epos La Galigo zaman Bugis kuno, kelahiran Bissu sama tuanya dengan keberadaan manusia di bumi. Bissu inilah yang kemudian mengatur segala hal di dunia dimulai dari penciptaan bahasa, adat istiadat dan segala sesuatu yang dibutuhkan di dunia baru. Para Bissu dianggap sebagai pendeta suci yang mewakili manusia dan memiliki gender sendiri yang mewakili laki-laki dan perempuan.

²Titiek Suliyati. *"Bissu:Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis"*.Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi. Vol.2 No.1, Desember 2018, hal.52.

Namun pada saat ini keberadaan masyarakat Bissu semakin berkurang. Di beberapa tempat jumlah Bissu sangat minim. Seperti di Segeri kini hanya ada tujuh Bissu yang tersisa dan beberapa Bissu lainnya masih dapat dijumpai seperti di Bone, Segeri, Wajo, dan Soppeng. Tetapi yang masih eksis atau mempertahankan eksistensinya sampai saat ini hanya ada dua kabupaten yakni Bissu di Kabupaten Pangkep dan di kabupaten Bone. Pada komunitas Bissu yang masih melestarikan peninggalan budaya tersebut dikabupaten Pangkep adalah seorang bissu yang bernama Ramli alias Bissu Nani ia adalah seorang puang matoa pada komunitas Bissu.

Saat ini eksistensi Komunitas Bissu masih dipegang oleh dua kabupaten yaitu Pangkep dan Bone, namun pada tahun 2022 ini komunitas Bissu di Bone mulai mengalami penolakan dalam rangkaian ritual-ritual adat yang setiap tahunnya biasanya mereka lakukan seperti dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Bone atau yang biasa di singkat HJB Bone yang ke 692 tahun ini para komunitas Bissu tidak lagi melibatkan diri. Hal ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar untuk para komunitas adat Bissu.

Jika di bandingkan Bissu yang ada di Pangkep dengan bissu yang ada di Bone, Wajo dan Soppeng. Bissu di Pangkep termaksud bissu yang masih di lestarikan di Kabupatennya sampai saat ini, dan masih melibatkan dalam acara-acara adat dan masih melalukan ritual Mapalili tidak seperti Bissu di kabupaten lainnya. Hal ini membuat keberadaan

kaum Bissu mulai mengalami Penurunan jumlah Bissu yang disebabkan berbagai faktor, baik faktor- internal maupun eksternal.

Faktor internal yaitu menurunnya minat dari orang atau individu untuk menjadi Bissu karena syarat-syarat dan ketentuannya begitu berat dan tidak ada lagi tanda-tanda yang dilihat oleh para Bissu yang biasanya diperlihatkan melalui mimpi. Faktor eksternal bersumber dari perubahan sistem pemerintahan, dari pemerintahan kerajaan menjadi pemerintahan republik. Hal ini berubah ketika pemerintahan negara berbentuk republik yang mengatur pemerintahan daerah yang dijalankan oleh bupati sesuai jenjang hierarki dengan masa jabatan yang telah ditentukan. Serta adanya pemberontakan Darul Islam atau tentara islam Indonesia (DI/TII), Pelanggaran terhadap apapun yang berhubungan LGBT dan adanya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.

Adapun faktor yang membuat para Bissu masih eksis ataupun masih dipertahankan hingga sekarang yaitu, Sikap masyarakat yang tetap ingin mempertahankan karena menghormati leluhur mereka sehingga membuat masyarakat merasa perlu untuk mempertahankan tradisi tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa komunitas Bissu memberikan manfaat bagi mereka baik dalam hal pelaksanaan upacara *Mappalili*, upacara pernikahan, dan upacara adat lainnya. Serta tradisi ini tetap ada karena di Bontomatene memiliki sikap kebersamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sehingga masyarakat masih mempertahankan dan tetap

menghargai keberadaan dari komunitas Bissu serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari di Bontomatene.³

Dari faktor tersebut sehingga membuat para kaum Bissu diharuskan untuk memiliki identitas setiap individu, baik itu kejelasan gender maupun agama. Para kaum Bissu tetap mematuhi aturan negara, karena mereka mengetahui bahwa mereka tinggal di negara demokrasi dan republik di mana mereka diharuskan memiliki KTP dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemerintahan.

Pada saat ini Pemerintah hanya memandang Bissu sebagai bagaian dari tradisi masa lalu yang fungsinya sebagai bagian dari adat dan tradisi itu mulai memudar sehingga pemerintah kemudian memberikan perhatian agar mengantisipasi kepudaran eksistensi komunitas Bissu.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa, negara dan pemerintahan berada pada posisi yang sentral dalam proses perumusan kebijakan. Bahkan, secara keseluruhan dapat dikatakan negara memegang peran yang sangat penting dalam hampir setiap aspek kehidupan sosial politik. Sebaliknya organisasi-organisasi sosial politik kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut sangat diragukan pengaruhnya dalam berbagai proses perumusan kebijakan,

³Axel Jeconiah Pattinama, Jetty E T Mawara, Welly E Mamosey. "Eksistensi Komunitas Bissu Pada Masyarakat Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan" Jurnal Holistik. Vol.13 No.4, Oktober-Desember 2020. hal.12.

terutama dalam kapasitasnya sebagai perwakilan kelompok maupun kepentingan masyarakat yang diwakilinya.⁴

Perumusan kebijakan dilakukan dengan melalui sebuah proses yang melibatkan berbagai faktor khususnya faktor budaya. Proses perumusan kebijakan pelestarian kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan yang melibatkan peran aktor-aktor- menjadi hal penting dalam upaya membantu suatu kebijakan pemerintahan partisipasi agar masyarakat adat mendapat perhatian dari pemerintah terhadap kelangsungan hidup mereka seperti pelestarian kebudayaan yang harus tetap dijaga dalam memberdayakan kebudayaan.⁵

Kebudayaan politik, setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda, dan ini berarti nilai dan kebiasaan hidup berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kebudayaan masyarakat dapat membentuk atau mempengaruhi tindakan sosial, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kebudayaan hanya salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan dalam politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang mencangkup nilai, kepercayaan, dan sikap tentang apa

⁴ Ng Philipus, Nurul Aini. Sosiologi dan Politik, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDOPERSADA, 2009), hal 162.

⁵ Hasrianti, Muhammad Tahir, Rulinawaty Kasmad. "*Model Participatory Governance (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep)*". Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi.Vol.1 No.1, Agustus 2020, hal.61

yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana melakukannya serta bagaimana hubungan dengan warganegaranya.⁶

Para kaum Bissu pada zaman dulu tidak terlibat ataupun melibatkan diri dalam sistem perpolitikan mereka hanya menjadi penasihat spiritualitas pada zaman kerajaan. Kemudian hal itu telah berubah semenjak berdirinya negara Indonesia pada tahun 1945, Negara mulai mengambil alih otoritas kerajaan dan pemerintahan dari para raja-raja, sehingga membuat para Bissu tidak memiliki kekuatan ataupun otoritas. Sehingga pada saat ini kaum Bissu mulai membuka diri dan berpartisipasi dalam sistem perpolitikan karena kesadarannya bahwa mereka tinggal di negara demokrasi dan NKRI.

Adat Bissu merupakan salah satu aset budaya yang memerlukan pelestarian dan perhatian dari pemerintah, upaya pemerintahan Pangkep dalam melestarikan dan memberikan kebijakan terhadap bissu sebagai para pelaku budaya. Belum terrealisasinya fasilitas dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah, hanya ada rumah adat, namun hanya diberikan oleh Puang Matoa. Kebijakan pemerintah Pangkep terhadap adat Bissu di Segeri belum begitu maksimal, baik berupa bantuan perekonomian yang telah dijanjikan oleh pemerintah bahwa para Bissu akan mendapatkan bantuan setiap bulannya, namun hal tersebut belum didapatkan oleh para kaum Bissu.

⁶ Ag. Subarsono. *"Analisis Kebijakan Publik"*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2005) hal.15

Pelibatan bissu dalam perumusan kebijakan sebagai landasan agar sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat marginal, akan tetapi hal ini masih kurang diterapkan dan pelibatan bissu dalam berbagai agenda pemerintahan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dalam struktur kerajaan sebenarnya tidak memperbolehkan dalam melakukan berbagai pementasan di beberapa daerah akan tetapi hal yang terjadi sekarang seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat bahwa terjadinya penjualan kebudayaan yang dilakukan hal ini dikarenakan tidak adanya penghasilan yang didapatkan para bissu untuk keberlangsungan hidup mereka selain dari melakukan pementasan, itu sama halnya dengan melakukan penjualan kebudayaan.⁷

Secara sosiologis kaum Bissu merupakan suatu individu atau kelompok yang menjunjung tinggi nilai adat dan kebudayaan leluhur yang turun temurun masih dipertahankan sampai saat ini sehingga menjadi salah satu faktor penentu berperilakunya para kaum Bissu. Perilaku sosial terjadi secara timbal-balik dan memiliki tujuan yang sama, hubungan sosial ada apabila para individu atau kelompok berperilaku sesuai yang diharapkan oleh pihak lain. Karena itu, suatu sistem nilai sosial beradaptasi secara total yang menghasilkan nilai budaya sehingga berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku masyarakat. Perubahan sistem nilai sosial menjadi nilai budaya itu demikian kuatnya meresap dan

⁷Hasrianti, Muhammad Tahir, Rulinawaty Kasmad, **Op.Cit.** hal.68

berakar di dalam jiwa penganutnya sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat, bahkan akan menimbulkan latensi.⁸

Sosiologi politik merupakan sentuhan dari ilmu sosiologi dan ilmu politik, percampuran antara dua ilmu ini memiliki implikasi terkait dengan keilmuan sosial, sepiantas orang membedakan bahwa ilmu politik tidak dapat bertemu dengan ilmu sosiologi, karena orang politik pasti akan mencari teori-teori yang terbaru berbeda dengan sosiologi yang mencari teori-teori lama, semakin lama semakin bagus sedangkan politik semakin baru semakin bagus.

Secara Politik kaum Bissu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini di atur oleh pemerintah, Maka saat berbicara mengenai negara bahwa negara adalah suatu daerah yang teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah.⁹ Sehingga membuat kaum Bissu merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

⁸ Yovita M. Hartarini, Tesis, *Komunitas Adat Bissu: Waria bertalenta sakti sebuah analisis sosio-budaya etnis bugis*, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas AKI, hal.201

⁹ Miriam Budiarjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2008.hal,49.

Kehadiran negaralah yang kemudian berusaha untuk menarik komunitas bissu menjadi bagian dari suatu masyarakat, agar bissu mendapat pengakuan terhadap hal itu. Melihat kekuasaan itu ada di tengah-tengah masyarakat yang dapat di akui oleh Negara. Hal inilah yang membuat Bissu di Pangkep masih eksistensi sampai saat ini karena pemerintah di Pakep berubaya agar bissu harus tetap dilestarikan

Dalam pandangan sosiologi politik terhadap kaum Bissu yaitu suatu komunitas atau kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat adat dan diakui keberadaanya oleh masyarakat setempat yang dimana para kaum Bissu memenuhi harapan sosial kesukaan, baik dalam menentukan perspektif masyarakat maupun fakta historis masyarakat lama sebagai pendukung kekuasaan tradisional secara “formal” dan “tidak formal”. Apabila eksistensi kaum waria kebanyakan mendapat tempat marginal bagi lingkungan sosial masyarakat Indonesia pada umumnya, berbeda dengan para waria Bugis yang mempunyai “kelebihan supranatural” dan berperilaku menurut norma dan etika yang tidak dimiliki dari waria di luar suku Bugis.¹⁰

Oleh karena itu alasan peneliti tertarik dan ingin mengangkat adat Bissu sebagai fokus penelitian ini karena melihat dari pengakuan negara menerima keberadaan Bissu sebagai salah satu warisan budaya dan sejarah, yang pada saat ini telah diambang kepunahan dan sebagai keunikan yang ada di pulau Sulawesi Selatan karena memiliki lima

¹⁰Yovita M. Hartarini. **Op.Cit.**, hal.198

gender. Meskipun kaum Bissu tidak memiliki gender, namun Bissu tetap mematuhi peraturan serta mengikuti kebijakan pemerintahan yang ada dan berpartisipasi dalam sistem perpolitikan.

Sebagai jurusan ilmu politik peneliti tertarik untuk mengkaji keberadaan kaum Bissu dalam kajian sosiologi politik yang akan membahas mengenai negara dan kekuasaan. Kemudian bagaimana pemerintah kabupaten Pangkep dalam menyikapi atau merespon keberadaan komunitas adat Bissu, pastinya pemerintah setempat sudah memberikan kebijakan terhadap para komunitas adat Bissu. Jika melihat fenomena Bissu yang begitu unik untuk diteliti di tengah-tengah masyarakat Pangkep dengan eksistensinya dalam hal ini kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Eksistensi Adat Bissu di Pangkep dalam Kajian Sosiologi Politik.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hubungan antar sesama kaum Bissu sehingga dapat mempertahankan tradisi kepercayaan ?
2. Bagaimana upaya kaum Bissu dalam mempertahankan eksistensinya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menjelaskan hubungan dan interaksi antar sesama Bissu sehingga dapat bertahan dalam komunitas kecil hingga pada saat ini
- 2) Untuk mendeskripsikan, menjelaskan serta mengetahui apa saja yang menjadi respon pemerintah daerah terhadap keberadaan komunitas kaum Bissu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini akan dilihat berdasarkan dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Politik sehingga dapat menjadi rujukan atau sebagai literatur yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi Ilmu Politik khususnya topik mengenai eksistensi adat Bissu di Pangkep dalam Kajian Sosiologi Politik.

2. Manfaat Praktis

1). Penelitian ini menambah pengetahuan penulis dalam mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diterima

selama duduk di bangku perkuliahan, terkhusus eksistensi adat Bissu di Pangkep dalam kajian Sosiologi Politik

2). Manfaat dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan bagi para peneliti yang ingin meneliti terkait kajian sosiologi politik dalam lingkup kebudayaan.

3). Pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai kajian sosiolog politik dalam masyarakat adat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sosiologi Politik

Sosiologi politik merupakan kajian interdisiplin, irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan politik. Apabila sosiologi mengkaji mengenai masyarakat, lalu politik mengkaji kekuasaan para pengambil keputusan, maka sosiologi politik mengkaji relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan yang diambil oleh penguasa. Konsep-konsep sosiologi politik bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman sehingga menarik perhatian siapa saja yang mengikuti dinamika politik. Manfaat terbesar dari bidang sosiologi politik adalah mencerdaskan pembaca dalam menganalisis situasi sosial politik yang ada disekitarnya.¹¹

Menurut Daniel Noer Politik adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern inilah memang kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.¹²

Adapun studi Sosiologi Politik, ada satu fokus studi yaitu pada masyarakat, Negara dan kekuasaan dan fokus perhatian adalah melihathubungan masyarakat dengan institusi politik, seperti sosialisasi

¹¹Susi Fitria Dewi. *Sosiologi Politik*. (Yogyakarta: Gre Publishing,2017). hal.3

¹² Miria Budiardjo, *Op. Cit.*,. hal.19.

politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, konflik dan demokrasi; dan hubungan masyarakat dengan institusi dan proses politik politik secara bersamaan, seperti budaya politik dan masyarakat sipil.

a. Negara

Sosiologi Politik sebagai ilmu negara, konsep ini mempergunakan kata “politik” dalam konotasinya yang biasa, yaitu yang berhubungan dengan negara. Kata “negara” diambil untuk mengartikan kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Praktisnya ada dua arti: negara bangsa (*nation-state*), menunjukkan masyarakat nasional, yaitu, komunitas yang muncul pada akhir Zaman Tengah dan kini menjadi paling kuat terorganisir dan paling utuh berintegrasi.

Definisi Politik menurut Miriam Budiardjo adalah berbagai macam kegiatan yang terjadi disuatu Negara, yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Jadi sosiologi politik tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat sebagai pokok perhatian sosiologi dan Negara serta kekuasaan sebagai pokok perhatian politik. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah “Negara” adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹³

¹³ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik. hal. 38

Negara Pemerintahan (*government-state*) menunjukkan penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional ini. Mendefinisikan Sosiologi Politik sebagai ilmu negara adalah menempatkannya dalam klasifikasi dalam ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat dari masyarakat yang dipelajari. Sosiologi Politik dengan demikian berada dalam kategori yang berbeda dari Sosiologi Keluarga, Sosiologi Kota, dan Sosiologi Etnik atau kelompok-kelompok minoritas.

Menurut Plato, Negara ideal menganut prinsip mementingkan kebijakan (*virtue*). Bahwa negara ideal atau negara terbaik bagi manusia adalah Negara yang penuh dengan kebijakan didalamnya. Kebijakan menurut Plato adalah pengetahuan. Apapun yang dilakukan atas nama Negara haruslah dimaksudkan untuk mencapai kebijakan itu. Demikian pentingnya prinsip kebijakan.

Kajian pertama dalam sosiologi politik adalah khusus di negara, terutama dalam respon masyarakat di dalamnya dan kebijakan yang harus diambil untuk menopang dan mensejahterakan masyarakat. Selain sebagai studi tentang negara dalam perannya, sosiologi politik juga digunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara yang baik. Kekuatan ini diperoleh melalui kajian sosiologi politik, khususnya dalam menarik partisipasi publik untuk dapat memberikan kepercayaan.

b. Kekuasaan

Menurut Damsar (2010) politik dalam kajian sosiologi dapat dibagi dalam 2 batasan yaitu Sosiologi politik adalah kajian yang mempelajari hubungan antar masyarakat, dimana Pertama, politik dirumuskan batasannya sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dengan politik, dimana hubungan itu saling mempengaruhi satu sama lain Kedua, Sosiologi politik dianggap sebagai sebuah pendekatan, dimana fenomena politik dilihat sebagai aktivitas yang berkaitan dengan proses dan sistem politik, yang didalamnya terdapat kekuasaan (power), kewenangan (aauthority), kehidupan publik (public life), pemerintahan (government), negara (state), konflik dan resolusi konflik (conflict dan conflict resolution), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decisonmaking),¹⁴ dan pembagian (distrubution) atau alokasi (allocation) dipandang dari sisi teori, konsep dan metodologi sosiologi.

Jadi didalam sistem politik terdapat kekuasaan, yang mana kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-laku sesorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.¹⁵

Konsep yang lebih modern menganggap bahwa Sosiologi Politik adalah ilmu kekuasaan, pemerintah, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia. bukan saja dalam masyarakat nasional. Konsep ini

¹⁴ Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.

¹⁵Materi, B. Uraian. "*PENDAHULUAN SOSIOLOGI POLITIK*." Hal.63

berasal dari dari apa yang Leon Duguit namakan perbedaan antara yang memerintah (*governants*) dan diperintah (*governes*).¹⁶

Sosiologi politik terkait dengan kekuasaan yang cenderung meyakini bahwa kekuasaan di negara secara fundamental tidak berbeda dengan kekuasaan di masyarakat lainnya. Disisi lain mereka menyamakan sosiologi politik secara implisit mengidentifikasi sosiologi politik dan menolak gagasan kedaulatan, atau lebih tepatnya mereka menganggapnya sebagai sistem nilai yang signifikan secara historis, masih memiliki sedikit makna tetapi tidak memiliki makna ilmiah dan tidak sesuai dengan realitas obyektif. Sebuah studi komparatif kekuasaan di berbagai kelompok masyarakat akan menjelaskan bagaimana kekuasaan yang dijalankan di negara dan berbeda dengan yang dilakukan oleh kelompok lain, jika perbedaan itu ada. Namun jika kita membatasi studi kekuasaan pada satu-satunya keadaan maka kita tidak dapat membandingkan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok lain.

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan

¹⁶ Maurice Duverger. *Sosiologi Politik*. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010). hal.17-18

dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok¹⁷.

Persoalan kekuasaan bukanlah masalah kepemilikan, dalam konteks siapa yang menguasainya siapa atau siapa yang kuat sementara yang lain tidak berdaya. Kekuatan tersebar, ada di mana-mana, imanen dalam setiap hubungan sosial. Ini bukan karena kekuatan itu memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan segala sesuatu dalam kondisi tembus pandang, tetapi karena kekuatan selalu dihasilkan setiap saat dan setiap hubungan. Kekuasaan ada di mana-mana bukan karena mencakup segalanya tapi karena datang dari mana saja.

Kemampuan penguasa untuk menggunakan satu atau lebih otoritas. Dengan kata lain, penguasa akan sangat bergantung kepada kemampuannya untuk menemukan dukungan atau legitimasi dalam ideologi-ideologi atau keyakinan-keyakinan yang ada pada masyarakat yang dikuasai. Oleh karena itu otoritas yang mereka peroleh akan bergantung pada kemampuan untuk mengembangkan aparatus administratif yang memadai dalam menjembatani antara yang menguasai dan yang dikuasai¹⁸

Secara umum fokus studi Sosiologi Politik menurut sosiologi menjadi dua pandangan. Pertama sosiologi politik adalah cabang sosiologi yang membahas kekuasaan yang terkait dengan Negara. Karena itu unit

¹⁷Umar Kamahi. "Teori kekuasaan Michael Foucault: tantangan bagi sosiologi politik." *Jurnal Al-Khitabah* 3.3 (2017). Hal. 199.

¹⁸Zainuddin Maliki. *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. UGM PRESS, 2018.

analisisnya adalah Negara. Sosiologi politik memfokuskan kajian pada perilaku sosial yang berkembang pada saat masyarakat memberikan respons terhadap sistem birokrasi. Masyarakat pemberi respons birokrasi inilah yang menjadikan bagian kajian sosiologi politik. Kajian Sosiologi Politik tidak terlepas dari keterkaitan dengan Negara. sebab hampir semua institusi memiliki kaitan dengan negara, dibandingkan dengan sesama organisasi privat. Pandangan kedua mengatakan bahwa masalah kekuasaan yang berkaitan dengan Negara, melainkan juga pada unit-unit kehidupan sosial yang lainnya.¹⁹

2.1.2 Makna Tentang Eksistensi

Dalam buku kamus ilmiah arti kata eksistensi adalah keberadaan wujud yang tampak. Eksistensi juga bisa diartikan keberadaan, dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya sesuatu yang diusahakan. Eksistensi merupakan pembuktian akan hasil kerja (performa) di dalam suatu kejadian. Eksistensi juga dapat diartikan suatu keberadaan yang -selain diakui oleh diri sendiridiakui juga oleh pihak lain. Kata eksistensi berasal dari kata Latin Existere, dari ex yang berarti keluar, dan sitere yang berarti membuat berdiri. Artinya apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas, apa yang dialami. Konsep ini menekankan bahwa sesuatu itu ada. Dalam konsep eksistensi, satu-satunya faktor yang membedakan setiap hal yang ada dari tiada adalah fakta. Setiap hal yang ada itu mempunyai eksistensi atau ia adalah suatu

¹⁹Susi Fitria Dewi, **Op. Cit.**, hal.10-15

eksisten. Hal ini kemudian melahirkan empat penjelasan baru tentang eksistensi, antara lain:

1. Eksistensi adalah apa yang ada.
2. Eksistensi adalah apa yang memiliki.
3. Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada.
4. Eksistensi adalah kesempurnaan.

Dengan kata lain, eksistensi adalah keadaan yang hidup atau menjadi nyata²⁰

Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur dan mengalami perkembangan meningkat, stagnan atau sebaliknya mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Oleh sebab itu, arti istilah eksistensi analog dengan “kata kerja” bukan “kata benda”. Sumber lain menjelaskan bahwa eksistensi adalah sesuatu yang akan mendapat maknanya jika adanya kontinuitas atau keberlanjutan dan keberlanjutan tersebut akan mendapat maknanya jika ada aktivitas sehingga eksistensi juga dapat diartikan sebagai keberlanjutan dari suatu aktivitas.²¹

Sedangkan, menurut Nadia Juli Indrani eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Di mana keberadaan yang dimaksud

²⁰Morgana, Charisma Mega. *Ritual Asy Syura Sebagai Perwujudan Eksistensi Pergerakan Kaum Syiah Menurut Pasal 1 Uu No. 1 Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Penistaan Agama Islam*. Diss. University Of Muhammadiyah Malang, 2017. Hal.23-24.

²¹Andriani, Maritfa Nika, and Mohammad Mukti Ali. "Kajian eksistensi pasar tradisional Kota Surakarta." *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) 2.2* (2013): 252-269. Hal.256

adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Dan sebuah pengertian luas dari eksistensi adalah pengaruh keberadaan seseorang atas lingkungannya.²²

Jadi, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi merupakan keberadaan yang memberikan pengaruh kepada lingkungan di sekitarnya di mana keberadaan itu berkembang (tidak kaku), bisa maju dan mundur tergantung dari kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Pengertian ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dari tidak ada menjadi ada (eksis).
2. Berpengaruh terhadap sekitarnya.
3. Berkembang, bisa mengalami kemajuan atau kemunduran.

²² Anonim. "*Pengertian Eksistensi Menurut Para Ahli*". Tersedia dalam <http://pengertianmu.com/>. Diakses pada tanggal 19April 2022, pukul 21.00 WITA.

2.1.3 Masyarakat Adat

Dalam sosiologi politik sendiri memfokuskan kajian pada saat masyarakat memberi respons terhadap sistem Birokrasi. Masyarakat sebagai pemberi respons Birokrasi inilah yang menjadi bagian kajian sosiologi politik. Ketika negara mengambil keputusan, para politisi perlu mempertimbangkan sistem pemerintahan yang berlaku, baik dari segi kebijakan, peraturan perundang-undangan yang ada, serta pemikiran respons masyarakat terhadap Yurisdiksi, Filosofi dan Sosiologis. Hal ini begitu menarik dan rumit untuk dibahas itu sebabnya dinamakan aktivitas politik, karena memperbincangkan apa yang terjadi, apa yang seharusnya dilakukan dan berusaha memperbaiki suatu kesalahan.

Konsep masyarakat adalah suatu sistem sosial yang menghasilkan kebudayaan.²³Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka

²³Lapse Nonton Boruto. 2014. *Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan masyarakat Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol.23.No.2, Hal.17.

mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.²⁴

Menurut Emile Durkheim keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial dalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.²⁵

Masyarakat adat Indonesia memang salah satunya kelompok masyarakat yang paling rentan. Kerentanan yang dimaksud adalah perlawanan masyarakat adat untuk mempertahankan kedaulatan, otonomi dan identitas. Kerentanan ini disebabkan oleh adanya tekanan dan kelemahan eksternal dan internal.

Kerentanan masyarakat adat mempertahankan hak-haknya dapat dikelompokkan menjadi adanya upaya pelemahan dan penghancuran yuridis. Pelemahan dan penghancuran yuridis adalah tindakan penegasian dan peniadaan hak-hak masyarakat adat melalui pemberlakuan berbagai hukum nasional oleh negara dan penerapan berbagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah.

²⁴ Noname, *BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan tentang Masyarakat*", diakses pada tanggal 24 Mei 2021, pukul 02.20. hal.18-20

²⁵ Ibid.,21

Oleh karena itu untuk melindungi komunitas adat/lokal, setidaknya diperlukan langkah-langkah strategis dengan pendekatan-pendekatan:

1. Mengenal dan memahami masyarakat adat setempat. Pada langkah ini perlu dicari informasi-informasi yang terkait dengan : (a) mengenali budaya, adat istiadat, hukum, kebiasaan, agama dan kepercayaan. Dalam masyarakat adat terdapat berbagai kebiasaan, adat istiadat, hukum dan sebagainya, yang harus dihormati dan dihargai, meskipun mungkin pihak luar menganggap bahwa hal-hal itu salah.
2. Transformasi timbal balik. Langkah ini dilakukan untuk pertukaran ilmu, keahlian dan teknologi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan seperti kegiatan pelatihan-pelatihan seperti : pendidikan hukum, pemetaan teritori adat, dan sebagainya.
3. Penggalangan dukungan. Langkah ini dilakukan untuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap pihak lain di luar masyarakat adat.²⁶

Saat ini keberadaan masyarakat adat sudah diakui dan dijamin perlingkungannya berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang ada, dalam kenyataan empirik banyak bermunculan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia. Masalahmasalah tersebut telah menyebabkan terjadinya berbagai

²⁶Syamsudin, Syamsudin. "Beban masyarakat adat menghadapi hukum negara." *Jurnal hukum ius quia iustum* 15.3 (2008): 338-351. Hal.348

sengketa yang menimpa masyarakat adat terutama sengketa yang bersifat vertikal/ struktural. Konflik ini terjadi antara masyarakat adat berhadapan dengan negara atau hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Konflik yang melibatkan masyarakat adat tersebut pada umumnya berupa sengketa mengenai penguasaan sumber-sumber ekonomi dan pangkalan budaya yang sehari-hari diyakini dan dijamin sebagai hak-hak tradisional masyarakat adat berhadapan dengan kepentingan-kepentingan investor melalui sarana hukum negara.²⁷

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama, jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Pandangan bahwa agama memberi pengaruh dalam proses terwujudnya hukum adat, pada dasarnya bertentangan dengan konsepsi yang diberikan oleh Van den Berg. Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas ini selalu berulang kembali dalam jangka waktu tertentu , sehingga membentuk suatu pola tertentu.

Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah aktivitas perilaku-perilaku, tindakan-tindakan individu satu terhadap yang lain yang kemudian

27

menimbulkan reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial. Perilaku dan tindakan manusia pada dasarnya adalah gerak tubuh manusia²⁸

Menurut Durkheim, konsentrasi agama yang paling utama dari masyarakat adalah aspek sacral. Namun ia juga memberikan peringatan kepada orang-orang agar tidak salah mengartikan bahwa yang sakral adalah sesuatu yang benar dan positif sedangkan profan adalah sesuatu yang salah dan negatif. Karena pada dasarnya di dalam hal yang sakral dan profan juga terkandung kebaikan dan keburukan. Sesuatu yang sakral biasanya merupakan bentuk aktivitas kelompok sosial yang memiliki aktivitas dan tujuan yang sama. Sedangkan sesuatu yang profan identic dengan aktivitas individu seseorang yang bukan mewakili kesatuan masyarakat.²⁹

Akulturası agama dan budaya terkadang memberikan kesulitan kepada masyarakat dalam memahami mana yang bersumber dari kemurnian agama dan mana yang bersumber dari interpretasi agama. Emile Durkheim kemudian mengungkapkan bahwa agama adalah sesuatu yang memiliki dua kategori yaitu sakral dan profane. Klaim ini kemudian diperkuat dengan pernyataan bahwa agama bisa dipahami dengan

²⁸ Noname, **Op.Cit.**, hal.21

²⁹ Ahmad ZaenalMustofa. *Konsep Kesakralan Masyarakat Emile Durkheim: Studi Kasus Suku Aborigin Di Australia*. Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Vol.12 No.3, Desember 2020, hal.274

adanya sistem sosial yang bisa menyatukan masyarakat yang disadarkan terhadap bentuk ritual dan kepercayaan yang sama.³⁰

Sama halnya dengan Bissu sebagai suatu kelompok sosial dalam masyarakat dan sebagai wujud kebudayaan, Bissu sebagai kelompok masyarakat adat yang memiliki ketertarikan budaya yang istimewa. Walaupun ritual dalam tradisi Bissu sangat bertolak belakang dengan agama, namun jika dilihat dari aspek lain bahwa negara tetap menerima dan mengakui keberadaan Bissu dengan mengingat bahwa Bissu adalah salah satu peninggalan sejarah Bugis Kuno dan menjadi salah satu kekayaan budaya yang harus dilestarikan, kaum Bissu sudah ada terlebih dahulu sebelum agama masuk, dari aspek politik dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungan kelompok maupun kebudayaan. Pemerintahan Pangkep pastinya sudah memiliki kebijakan tersendiri untuk para kaum Bissu dengan melihat keberadaannya hingga pada saat ini.

Merujuk pada tulisan Davies (2018), bahwa pada tahun 1957 istana kerajaan Bugis ditutup. Akan tetapi sisi kegiatan lain masih berjalan secara informal. Setelah berakhirnya masa kerajaan dan masuknya ajaran Islam garis keras, penindasan terhadap mereka berlanjut pada tahun 1965. Dari sejarah nasional Indonesia sendiri, tahun 1965 *arajang* sebagai rumah adat digoyang oleh salah satu ormas pemuda karena dianggap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) (Lathief, 2004). Dengan

³⁰ Ibid.,266

selesainya masa Orde Lama yang ditandatangani dengan DI/TII dan Orde Baru yang juga ditandai dengan gerakan PKI, maka datanglah era Reformasi. Era ini ditandai dengan revitalisasi adat, terlibatnya mereka dalam industri pariwisata, menjadikan mereka semakin terpuruk. Pelaksanaan program revitalisasi yang berlangsung, tidak sesuai dengan nilai dan tradisi, akhirnya ritual yang dilakukan hanya sebatas aktivitas seni. Dengan masuknya hal-hal ini, pengalaman-pengalaman masa depan Bissu pasti akan menjadi sangat dinamis.

Novel TSB (2018) memunculkan kompleksitas permasalahan yang menarik. Kompleksitas tersebut mulai dari sisi histori masa kerajaan, pergolakan politik dan perubahan keberterimaan bissu di kalangan masyarakat Bugis. Sebagai sebuah awal kemunculan Bissu di daerah sekarang. Masa kejayaan Bissu dikenal dengan masa sebelum kedatangan Islam. Masa ini ditandai dengan masih berjalannya sistem kerajaan, dan segala aturannya yang mengikat. Kala itu kerajaan di tanah Bugis, menggunakan Bissu sebagai penanggung jawab spiritualitasnya. Setelah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, komunitas Bissu memulai pergolakan yang panjang. Namun walaupun kepercayaan terhadap mereka memudar, jasanya tetap digunakan sebagai perias pengantin atau akrab dikenal sebagai *indobotting* (perias pengantin). Di lain kesempatan jasa mereka juga dipakai sebagai dukun/sandro. Atau bahkan istilah pendeta (*priest*) juga digunakan untuk menyebut Bissu.³¹

³¹Muh. Fatoni Rohman & Siti Zurinani. *"Bissu" Dalam Imaji dan Realita*. hal.53-54

Penampilan Bissu dalam adat menunjukkan upaya untuk menciptakan kembali hilangnya signifikansi politik dari Bissu, sebelum pemerintahan terbentuk hak seperti tanah dan kekuasaan diatur oleh kerajaan. Di Sulawesi Selatan yang di mana terdapat dua kerajaan besar yaitu; Gowa dan Bone, Bissu memiliki peran penting dalam kerajaan yaitu sebagai penasehat spiritual raja, dengan misi penting ini, bissu memperoleh keuntungan politik dan ekonomi. Namun hal itu telah berubah semenjak berdirinya negara Indonesia pada tahun 1945. Negara mulai mengambil alih otoritas kerajaan dan pemerintahan dari para raja-raja, sehingga membuat para Bissu tidak memiliki kekuatan ataupun otoritas dan kehilangan signifikansi politik didalamnya.

Sekarang Bissu sedang berjuang untuk bangkit kembali dari signifikansi publik, mereka mulai melibatkan diri secara institusional pada adat, keterlibatan Bissu dengan adat dapat dianggap sebagai upaya negara untuk membuang subjektivitas bissu sebagai dukun dan interpelasi (dalam pengertian Althusser) Bissu digunakan sebagai subjektivitas yang dipromosikan negara untuk menghibur. Saya berpendapat itu asumsi ini rapuh karena dua alasan. Pertama, adat dipromosikan oleh negara sebagai bentuk seni rupa, adat dan agama tetap tidak dapat dipisahkan dalam sosial dan praktik budaya.³²

Dengan pemahaman ini, adat merupakan konteks yang ideal di mana para Bissu bernegosiasi dan menjadikan subjektivitas mereka

³² Umar Umar. **Op. Cit.**, hal.13

sebagai hermafrodit Muslim Bugis dukun melalui ketidaksesuaian antara wacana nasional adat dan praktik sosial dan budaya adat . Kedua karena adat adalah konsep yang berhubungan ke masa lalu Bissu juga menegosiasikan subjektivitasnya melalui retorika masa lalu. Bissu memiliki potensi ini karena kehadiran mereka berhubungan dengan Bugis masa lalu I La Galigo , tanda kebesaran kerajaan, dan leluhur. Selain itu, subjektivitas Bissu bergantung pada bagaimana mereka mengartikulasikan kesesuaian antara hermafroditisme dan perilaku seksual normatif di Islam sejak mereka mengklaim diri mereka sebagai Muslim. Untuk mendapatkan kekuatan spiritual, menurut bissu , bissu haruslah hermafrodit. Persepsi ini didasarkan pada yang bissu persepsi bahwa roh-roh atau dewa-dewa (dewata) yang tak ada kelamin dan hanya mendiami tubuh hermafrodit.³³

Maka keberadaan negara yang pada dasarnya mewadahi seluruh keberadaan masyarakat seperti masyarakat adat. Kehidupan masyarakat adat seharusnya tidak dapat diubah dalam tatanan adat yang telah dianutnya. Keberadaan masyarakat adat dengan tatanan tradisionalnya dapat bersinergi dengan sistem kenegaraan. Negara seharusnya melakukan perlindungan khusus, sebaliknya kehadiran masyarakat adat di tengah-tengah negara harus tetap berada dalam jalur kesatuan.³⁴

³³ Ibid., hal.13

³⁴Akmal, Skripsi: "*Efektivitas Pengelolaan Pemerintah Daerah Terhadap Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep*"(Telaah atas dasar hukum ketatanegaraan islam). (Makassar: UIN,2019), hal.3

2.2 Telaah Pustaka

Salah satu cara untuk menyusun skripsi ini yaitu berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang berupa karya tulis terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Hal ini untuk menghindari penelitian berulang tentang kajian sosiologi politik. Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas penyusun.

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini seperti peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Titiek Suliyati yang berjudul Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis, secara spesifik skripsi ini membahas tentang bagaimana keistimewaan Bissu dalam tradisi adat Bugis. Tentu saja judul saya akan berbedah dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian saya membahas mengenai eksistensi masyarakat adat Bissu dalam kajian sosiologi politik di Pangke.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Hasrianti, Muhammad Tahir dan Rulinawaty Kasmad yang berjudul Model Participatory Governance (Perumusan kebijakan adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep), penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan publik yang mengarah pada administrasi publik menyangkut adat Bissu di Segeri kabupaten Pangkep. Sedangkan dalam penelitian saya berjudul eksistensi masyarakat adat Bissu dalam kajian sosiologi politik tentunya sangat berbedah dengan

penelitian sebelumnya, karena penelitian ini lebih fokus membahas mengenai kekuasaan dan negara, salah satunya yaitu dimana bagaiman respon pemerintah setempat dalam melihat atau menyikapi keberadaan komunitas Bissu.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Muh Said berjudul Peran Bissu dalam masyarakat Bugis, tentang peran bissu pada masa kerajaan (sebelum Islam dan setelah Islam) di Sulawesi Selatan, untuk mengetahui tentang kehidupan ritual bissu setelah masa kemerdekaan. Hasil penelitian ini bahwa bissu adalah pelaksana ritual kerajaan pada masyarakat Bugis kuno, posisinya sebagai penyambung (pengkomunikasi) antara masyarakat dengan dewata yang dilafazkan dengan bahasa to riolo. Bissu memegang peranan penting disetiap seremoni adat dikerajaan sebab mereka adalah pelayan raja, dan juga sebagai pengabdian di masyarakat. Setelah agama Islam dianut oleh orang Bugis, peranan para bissu digantikan oleh Puang kali (kadhi). Bissu yang mempercayai kesaktian arajang menjadi tertuduh penganut komunis, mereka dianggap tidak beragama, melakukan perbuatan syirik serta dianggap penganut animisme. Dalam penelitian saya yang berjudul eksistensi adat Bissu dalam kajian sosiologi politik di Pangkep berbedah dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada penelitian saya yaitu membahas mengenai keberlangsungan hidup bissu pada saat ini dimana negara mulai menerima dan memberikan ruang untuk komunitas bissu sebagai pelaku-pelaku seni dan budaya.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Liswati yang berjudul Ritual adat mappalili di segeri kabupaten pangkep Tulisan ini mengkaji tentang proses ritual adat Mappalili di Segeri Kabupaten Pangkep, yakni sebuah ritual adat yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Segeri, ritual adat Mappalili merupakan upacara sebagai tanda untuk memulai menanam padi, sekaligus ungkapan rasa syukur masyarakat Segeri atas limpahan rezki dari Tuhan yang diterima selama setahun. Baik itu rezki yang berupa kesehatan maupun hasil panen yang memuaskan. Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana wujud ritual adat Mappalili di Segeri Kabupaten Pangkep. Tentu saja penelitian ini akan jauh berbedah karena judul ini membahas eksistensi masyarakat adat Bissu dalam kajian sosiologi politik di Pangkep yang membahas mengenai bagaimana kebijakan –kebijakan pemerintah setempat merepon keberadaan komunitas bissu dalam melakukan ritual dan sebagai pelaku seni.

Dan penelitian selanjutnya ditulis oleh Axel Jeconiah Pattinama, Jetty E T Mawara, Welly E Mamosey yang berjudul Eksistensi Komunitas Bissu Pada Masyarakat Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan, penelitian ini membahas tentang bagaimana keberadaan Bissu dan eksistensi Bissu yang ada di Segeri kabupaten Pangkep. Pada penelitian saya dengan penelitian sebelumnya berbedah karena pada penelitian saya membahas bagaiman hubungan antar sesama kaum bissu, bagaimana keberadaan kaum bissu

saat ini di masa eksistensinya dan membedakan antar bissu yang ada di Pangkep dan bissu-bissu yang ada di kabupaten lainnya.

Sehingga yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu melihat dan mengetahui bagaimana kaum Bissu dapat diterima oleh negara hingga pada pemberian kebijakan pemerintahan Pangkep terhadap keberadaan adat Bissu, serta upaya dari pemerintah dalam pelestarian adat Bissu, kemudian bagaimana hubungan antar sesama bissu dapat mempertahankan tradisi kepercayaan dan apa upaya dari kaum bissu hingga dapat eksis samapi saat ini, hal ini yang kemudian bissu mendapat tempat dipemerintah dan respon dari pemerintah inilah yang menjadi kajian dalam kajian sosiologi politik.

2.3 Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skema pikir yang menggunakan teori sosiologi politik dalam menganalisis eksistensi adat Bissu di Pangkep dalam kajian sosiologi politik. Peneliti ingin melihat lebih jauh kebijakan pemerintah pangkep dengan menyikapi keberadaan adat Bissu di tengah - tengah masyarakat adat Bugis.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mampu mendukung apa yang menjadi pokok ataupun topik pembahasan yang akan diteliti. Teori kajian sosiologi politik yang digunakan menjadi pisau analisis yang mampu mengetahui apa saja kebijakan politik pemerintah Pangkep yang diberikan kepada para kaum Bissu yang pada saat ini sudah diambang

kepunahan dan menjadi daya tarik para wisatawan karena memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti menggunakan teori ini dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui secara lebih mendalam kebijakan politik pemerintah Pangkep terhadap kaum Bissu.

2.4 Skema Pikir

